

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang ;
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD Kabupaten Muara Enim untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim pada tanggal 30 November 2006, dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Muara Enim pada tanggal 17 Januari 2007.
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59/KPTS/V/2007 tanggal 6 Februari 2007 terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 perlu dilakukan penyempurnaan, berdasarkan hal diatas maka Bupati Muara Enim bersama dengan Panitia Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 06 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007 sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang

R

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan



- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 6 Seri E);

Dengan



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 632.290.986.558
2. Belanja Daerah	Rp. 721.719.383.156,24
Surplus/(Defisit)	(Rp. 89.428.396.598,24)
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp 93.549.697.374,48
b. Pengeluaran	Rp 4.121.300.776,24 (-)
Pembiayaan Netto	Rp.89.428.396.598,24
Sisa Lebih Pembiayaan	
AnggarantahunBerkerjaan	Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 38.019.909.120 |
| b. Dana perimbangan | Rp.558.113.929.256 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. 36.157.148.182 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-------------------|
| a. Pajak daerah | Rp. 9.770.233.000 |
| b. Retribusi daerah | Rp. 9.122.757.810 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
Yang dipisahkan | Rp. 1.928.768.490 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp.17.198.149.820 |

(3). Dana

f.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.211.924.929.256
b. Dana alokasi umum	Rp.335.566.000.000
c. Dana alokasi khusus	Rp 10.623.000.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	Rp -
b. Dana darurat	Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.13.157.148.182
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.23.000.000.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung	Rp.260.840.491.436,24
b. Belanja Belanja Langsung	Rp.460.878.891.720

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	Rp.223.296.981.441,69
b. Belanja bunga	Rp. 91.832.868,55
c. Belanja subsidi	Rp. 500.000.000
d. Belanja hibah	Rp. -
e. Belanja bantuan sosial	Rp. 17.325.124.178
f. Belanja bagi hasil kepada Desa	Rp. 36.716.948
g. Belanja bantuan keuangan	Rp. 16.139.836.000
h. Belanja tidak terduga	Rp. 3.450.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	Rp. 50.259.820.550
b. Belanja Belanja barang dan jasa	Rp. 113.107.655.158
c. Belanja Modal	Rp 297.511.416.012
	Rp. 460.878.891.720

Pasal 4

f.

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Rp. 93.549.697.374,48
- b. Pengeluaran Rp. 4.121.300.776,24

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 93.549.697.374,48
- b. Pencairan dana cadangan Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah Rp. 2.904.585.000,-
- c. Pembayaran pokok utang Rp. 266.253.027,24
- d. Pemberian pinjaman daerah Rp. -
- e. Pembentukan Investasi Jangka Panjang Lainnya (Gerbang Serasan Sektor Perkebunan) Rp. 950.462,749

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I

- 1 Lampiran I ; Ringkasan APBD
- 2 Lampiran II ; Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III ; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan belanja dan pembiayaan;
- 4 Lampiran IV ; Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- 5 Lampiran V ; Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
- 6 Lampiran VI ; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan
- 7 Lampiran VII ; Daftar Piutang Daerah
- 8 Lampiran VIII ; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9 Lampiran IX ; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- 10 Lampiran X ; Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
- 11 Lampiran XI ; Daftar kegiatan kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
- 12 Lampiran XII ; Daftar dana cadangan daerah ; dan
- 13 Lampiran XIII ; Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 17 Januari 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 21 Februari 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A